

Kearifan Lokal Sebagai Pilar Perdamaian: Analisis Tradisi Resolusi Konflik Keagamaan dalam Konsep “Palembang Zero Konflik”

Riza Adelia Suryani

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya, Indonesia

Email: rizaadeliasuryani@fisip.unsri.ac.id

ARTICLE INFO

Article history

Received: 07-11-2025

Revised: 11-11-2025

Accepted: 28-11-2025

Keywords

Resolusi Konflik, Kearifan Lokal, Palembang Zero Konflik.

ABSTRACT

Indonesia sebagai negara multikultural memiliki kerentanan tinggi terhadap konflik sosial, terutama yang bersumber dari perbedaan agama dan budaya. Namun demikian, Kota Palembang dengan semboyannya “*Palembang Zero Konflik*” memberikan contoh keberhasilan dalam mengelola keberagaman secara harmonis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model penyelesaian konflik berbasis budaya lokal yang diterapkan di Kota Palembang. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa nilai-nilai kearifan lokal seperti musyawarah, gotong royong, dan toleransi menjadi pilar utama dalam mencegah serta menyelesaikan konflik. Model ini terbukti efektif dalam menangani konflik berskala kecil hingga menengah, meskipun menghadapi tantangan modernisasi dan dinamika media sosial yang dapat memicu ketegangan baru. Hasil penelitian diharapkan menjadi referensi dalam pengembangan model resolusi konflik berbasis budaya yang relevan bagi daerah lain di Indonesia guna memperkuat integrasi sosial dan perdamaian berkelanjutan.

Indonesia, as a multicultural nation, is highly vulnerable to social conflicts, particularly those rooted in religious and cultural differences. However, the city of Palembang, with its motto “Palembang Zero Conflict,” presents a tangible example of how diversity can be effectively managed. This study aims to analyze the culture-based conflict resolution model implemented in Palembang. Using a qualitative case study approach, the findings reveal that local wisdom values such as deliberation, mutual cooperation, and tolerance serve as the main pillars in preventing and resolving conflicts. This cultural model has proven effective in addressing small to medium-scale conflicts despite challenges from modernization and the influence of social media. The results are expected to serve as a reference for developing culturally grounded conflict resolution models that can be adapted by other regions in Indonesia to strengthen social cohesion and sustainable peace.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.



How to Cite: Suryani, R. A. (2025). Kearifan Lokal Sebagai Pilar Perdamaian: Analisis Tradisi Resolusi Konflik Keagamaan dalam Konsep “Palembang Zero Konflik”. *Haumeni Journal of Education*, 5(3), 47-66. doi: 10.35508/haumeni.v5i3.25840

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara multikultural memiliki keragaman suku, agama, dan budaya yang menjadikannya rentan terhadap konflik, terutama konflik bernuansa keagamaan. Meski demikian, terdapat sejumlah daerah yang mampu menjaga stabilitas sosial dan menjadikan toleransi sebagai bagian dari identitas kolektif masyarakat. Salah satu daerah tersebut adalah Kota Palembang, yang dikenal dengan semboyan *Palembang Zero Konflik*. Semboyan ini tidak hanya menjadi slogan, tetapi juga

cerminan dari upaya nyata masyarakat dan pemerintah daerah dalam menjaga harmoni antarpemeluk agama.

Konsep "zero konflik" dalam konteks masyarakat majemuk seperti Palembang bukanlah utopia tanpa perselisihan, melainkan lebih merujuk pada kemampuan masyarakat untuk mencegah pembesaran konflik menjadi kekerasan dan menemukan mekanisme penyelesaian yang damai dan konstruktif. Dalam konteks ini, tradisi-tradisi lokal dan kearifan masyarakat Palembang dalam mengelola perbedaan dan menyelesaikan perselisihan beragama memegang peranan yang signifikan.

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi secara mendalam tradisi-tradisi resolusi konflik beragama yang hidup dan dipraktikkan oleh masyarakat Palembang. Melalui studi eksplorasi ini, diharapkan dapat diidentifikasi bentuk-bentuk tradisi, nilai-nilai yang mendasarinya, aktor-aktor yang terlibat (tokoh agama, adat, pemerintah, komunitas), serta efektivitas tradisi tersebut dalam membangun harmoni dan meminimalisir potensi konflik beragama.

Urgensi penelitian ini semakin relevan dalam konteks Palembang yang secara simbolis diakui sebagai kota "Zero Konflik". Misalnya, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Kota Palembang menyatakan bahwa kota ini telah berhasil menciptakan kerukunan antarumat beragama. (Palembang, 2025). Meski demikian, angka toleransi dari riset lembaga pemantau menunjukkan tantangan tersendiri: menurut laporan Indeks Kota Toleran (IKT) versi Setara Institute, Palembang berada di antara kota dengan skor toleransi rendah. (SuaraIndoid, 2024)

Data dari lembaga civil society juga memperkuat konteks kebutuhan pelestarian tradisi resolusi konflik. Yayasan Wahid Foundation, dalam berbagai survei dan laporan kebebasan beragama, menyoroti bahwa intoleransi dan politisasi agama masih menjadi pekerjaan rumah penting di Indonesia (Foundation, 2021). Sebagai contoh, survei Wahid Foundation mencatat bahwa dalam beberapa periode terdapat peningkatan sentimen intoleran dan potensi radikalisme yang, walaupun relatif kecil sebagai persentase, bila dikonversi ke skala populasi nasional menjadi masalah yang signifikan. (Foundation, 2021)

Sementara catatan sejarah lokal dan pengamatan sosial di Palembang belum terdokumentasi secara menyeluruh dalam literatur akademik, indikasi adanya praktik toleransi dan resolusi konflik berbasis adat dan agama tampak dari status kerukunan yang diklaim oleh tokoh-tokoh lokal (seperti pengakuan PGI terhadap "zero konflik"). Pendekatan tradisional seperti musyawarah, mediasi melalui pemuka agama, atau peran lembaga adat dapat menjadi modal sosial yang sangat berharga. Dengan menelusuri tradisi-tradisi ini, penelitian diharapkan memberikan kontribusi akademis untuk pengisian gap literatur serta kontribusi praktis melalui rekomendasi penguatan dan pelestarian tradisi lokal sebagai bagian dari strategi kerukunan yang berkelanjutan.

Tinjauan Pustaka

***Social Mapping* Tradisi Resolusi Konflik Beragama Masyarakat Palembang**

Masyarakat Palembang menunjukkan pola relasi sosial yang sangat kompleks dalam mempertahankan kerukunan antarumat beragama melalui tradisi lokal. Misalnya, di Kampung Kapitan Palembang, tradisi *sedekah kampung* telah menjadi mekanisme sosial penting: meskipun kampung tersebut sangat heterogen secara agama, tradisi ini menumbuhkan kebersamaan, solidaritas, dan sikap saling menghargai antarumat beragama. Penelitian kualitatif lapangan menemukan bahwa warga menyebut nilai toleransi, kebebasan beragama, dan penghargaan terhadap keberagaman sebagai faktor utama menjaga harmoni. (Pahlevi, 2023)

Dari sisi aktor kunci dalam pemetaan sosial, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Palembang berperan signifikan. Menurut laporan media, FKUB rutin melakukan deteksi dini terhadap isu intoleransi, ketidakharmonisan sosial, dan izin pendirian rumah ibadah sebagai bagian dari strategi menjaga “zero konflik” di Palembang (Sumeksco, 2025). Peran ini menunjukkan bahwa ada koordinasi formal (pemerintah lokal) yang saling berjejaring dengan tradisi lokal sebagai bagian dari struktur sosial pemetaan konflik.

Nilai-nilai lokal yang teridentifikasi dalam pemetaan termasuk musyawarah, gotong royong, dan akomodasi antar-etnis dan antar-agama. Studi sosiologis menemukan bahwa interaksi antara etnis Arab, Tionghoa, dan Melayu di Palembang dilakukan dengan cara deliberatif dan akomodatif, di mana pemahaman lintas budaya dan agama sangat penting (Malleleang et al., 2022). Selain itu, dalam komunitas Buddhis minoritas di Palembang, para penganut Buddhisme berkompromi dengan identitas budaya Melayu-Islam melalui akulturasi tradisi lokal, menciptakan harmoni sosial yang stabil (Fatah, 2021).

Metode resolusi konflik yang muncul dari *social mapping* ini bukan sekadar lisan atau informal. Karena keterlibatan aktor formal seperti FKUB dan pemerintah menunjukkan bahwa mekanisme budaya tradisional (seperti *sedekah kampung*) telah diintegrasikan ke dalam jaringan sosial dan institusi modern. Sinergi semacam ini mencerminkan pemetaan sosial yang efektif — tradisi lokal dipetakan sebagai modal sosial dalam jaringan sosial kontemporer untuk menjaga kerukunan agama di Palembang (Nugraha et al., 2023a).

Tradisi Resolusi Konflik Beragama Sebagai Perwujudan Toleransi di Palembang

Masyarakat Melayu Palembang mempertahankan tradisi resolusi konflik yang mengakar pada kearifan lokal seperti musyawarah adat dan ritual kebersamaan. Sebagai contoh, tradisi Ruwahan tetap dijalankan sebagai *sedekah bersama* melalui pengajian, doa, dan jamuan makan — bukan hanya sebagai

praktik keagamaan tetapi juga sebagai sarana memperkuat kohesi sosial dan menekan potensi gesekan antarindividu (Pahlevi, 2023). Sementara itu, ritual Tepung Tawar Perdamaian digunakan sebagai mekanisme mediasi tanpa jalur pengadilan, di mana tetua adat melakukan dialog untuk menciptakan mufakat (Grant et al., 2022). Dalam perkembangan modern, budaya Melayu Palembang juga menyesuaikan tradisi dengan tantangan globalisasi dan pluralisme: menurut analisis politik budaya, tokoh adat mengintegrasikan nilai-nilai musyawarah dan persatuan dalam menghadapi dinamika sosial kontemporer (Jaya, 2019). Dengan demikian, tradisi ini bukan hanya warisan masa lalu, tetapi telah diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan resolusi konflik di era modern.

Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Mediasi Konflik Antar agama

Nilai-nilai kearifan lokal di Palembang, seperti gotong royong, musyawarah mufakat, rasa malu (segan), dan konsep "besan" antar komunitas, memainkan peran penting dalam mediasi konflik antaragama. Tradisi ini menekankan pentingnya menjaga kehormatan bersama, membangun rasa saling menghargai, dan menghindari tindakan yang dapat mempermalukan komunitas sendiri (Nurdiansyah et al., 2024). Kearifan lokal Palembang mendorong penyelesaian konflik dengan pendekatan humanis yang lebih mengutamakan hubungan sosial dibandingkan formalitas hukum. Tokoh agama, adat, dan masyarakat diundang untuk menjadi mediator dalam konflik-konflik kecil sebelum membesar, memastikan bahwa setiap potensi konflik dapat diselesaikan di tingkat komunitas. Pendekatan ini tidak hanya efektif dalam meredam ketegangan, tetapi juga memperkuat struktur sosial berbasis nilai lokal, sehingga memperkuat ketahanan sosial terhadap konflik yang bernuansa agama.

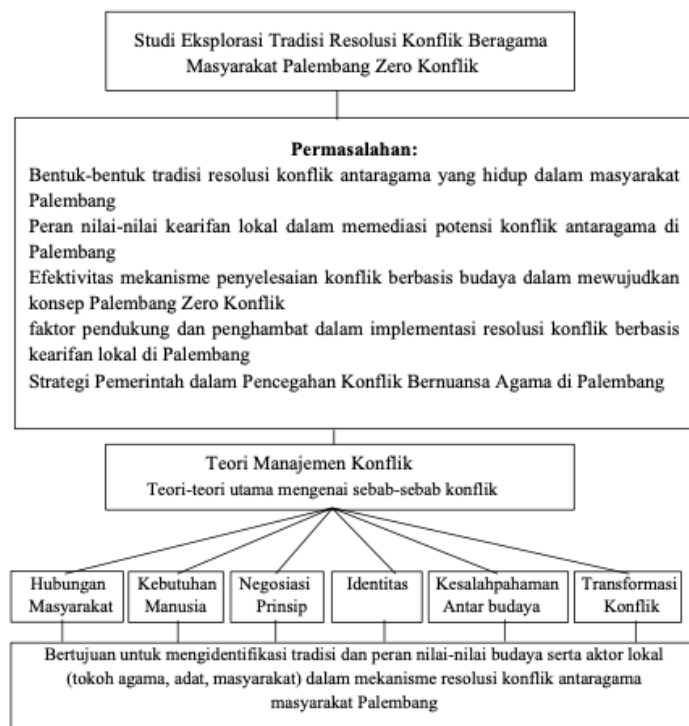
METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur dalam penelitian ini. Dalam (Putrihapsari & Fauziah, 2020) mengatakan studi literatur adalah jenis penelitian yang mempertimbangkan berbagai wawasan pustaka yang diperlukan untuk penelitian. Dalam penelitian ini, metode survei literatur digunakan untuk memulai rencana penelitian dengan mendapatkan data lapangan dengan menggunakan literatur tanpa melakukan proses langsung.

Sumber data yang menjadi referensi dalam penelitian ini adalah sumber pustaka yang relevan sebagai sumber data primer (data hasil penelitian, laporan penelitian, jurnal ilmiah, dan sebagainya) dan sumber data sekunder (peraturan dasar hukum pemerintah, buku, dan sebagainya). Setelah mendapatkan sumber data sebagai referensi, maka dilanjutkan dengan analisis data kajian pustaka yang dilakukan menggunakan analisis isi (*content analysis*). Analisis ini adalah dimana peneliti mengupas suatu teks dengan objektif untuk mendapatkan gambaran dari suatu isi apa adanya, tanpa campur tangan peneliti. Dalam hal ini peneliti akan melakukan pembahasan secara mendalam terhadap isi suatu informasi pada sumber data yang perlu pengaturan waktu untuk membaca dan menelaah data tersebut sehingga terdapat suatu hasil. Hasil inilah yang kemudian diharapkan dapat menjawab permasalahan dan digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan hasil dan kesimpulan.

Adapun kerangka pemikiran dapat ditampilkan sebagai berikut:

Gambar 1 Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah oleh Peneliti

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Resolusi Konflik dalam Masyarakat Multikultural

Resolusi konflik merupakan proses penyelesaian perselisihan secara damai melalui berbagai pendekatan, seperti negosiasi, mediasi, atau rekonsiliasi. Dalam konteks masyarakat multikultural, pendekatan ini harus mempertimbangkan keragaman budaya, agama, dan nilai sosial agar solusi yang dihasilkan inklusif dan berkelanjutan. Masyarakat multikultural seperti Palembang, yang terdiri dari berbagai etnis dan agama, memerlukan mekanisme resolusi konflik yang sensitif terhadap perbedaan. Dimana keberhasilan resolusi konflik dalam masyarakat multikultural bergantung pada tiga faktor utama, yaitu pengakuan terhadap identitas kelompok, mekanisme partisipatif yang melibatkan semua pihak, dan pemanfaatan kearifan lokal sebagai landasan rekonsiliasi.

Meskipun tradisi seperti *duduk berimbang*, *musyawarah mufakat*, dan prinsip “adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah” telah lama menjadi mekanisme efektif dalam meredam konflik di Palembang, dinamika sosial modern membawa tantangan baru yang dapat melemahkan efektivitas tradisi tersebut. Di tingkat lokal, modernisasi struktur pemerintahan dan meningkatnya persaingan politik elektoral sering mempengaruhi proses penyelesaian sengketa. Misalnya, dalam beberapa kasus, aktor politik lokal memanfaatkan isu agama atau identitas etnis sebagai mobilisasi dukungan, sehingga

konflik yang sebelumnya bisa diselesaikan melalui musyawarah menjadi lebih sulit diselesaikan karena kepentingan kekuasaan memperkuat polarisasi sosial.

Fenomena ini tidak hanya terjadi di Palembang, tetapi juga tercatat dalam kasus lain di Indonesia. Studi tentang konflik etnis dan agama di Ambon menunjukkan bahwa mekanisme adat seperti *pela-gandong* menjadi lemah ketika intervensi elite politik mempolitisasi identitas komunitas, memindahkan konflik dari ranah sosial ke ranah persaingan politik formal (Braithwaite et al., 2010). Kondisi serupa tercatat pada konflik di Poso, di mana tradisi lokal seperti penyelesaian sengketa berbasis adat kehilangan legitimasi ketika kepentingan politik membawa isu konflik ke level institusional dan *electoral competition* (McRae, 2013).

Benturan lain terjadi ketika nilai modern, misalnya kebebasan individu, sistem hukum nasional, dan regulasi administratif, berbenturan dengan tradisi lokal yang berbasis kolektivisme dan harmoni komunal. Di beberapa kota, proses izin rumah ibadah (yang sebelumnya bisa dimusyawarahkan melalui forum warga) kini harus melalui prosedur legal formal. Ketika warga setempat menolak, pemerintah daerah sering berada dalam posisi sulit karena harus menyeimbangkan tuntutan legal-formal dengan norma harmoni sosial.

Di Palembang sendiri, media lokal mencatat bahwa FKUB sering berperan sebagai mediator ketika regulasi modern mengenai pendirian rumah ibadah menimbulkan resistensi masyarakat, mengindikasikan bahwa tradisi dialog masih berjalan tetapi harus bersanding dengan kebijakan formal (Nugraha et al., 2023b).

Dengan demikian, tradisi resolusi konflik masih relevan, tetapi efektivitasnya kini sangat dipengaruhi oleh konteks modern: politisasi identitas, kompetisi elektoral, perubahan struktur hukum, dan meningkatnya ekspresi kebebasan individu. Tradisi lokal tetap berfungsi, namun kini harus beroperasi dalam arena sosial yang jauh lebih kompleks dibanding generasi sebelumnya.

Kearifan Lokal sebagai Mekanisme Resolusi Konflik

Palembang dikenal sebagai kota yang memiliki banyak perbedaan agama, suku, dan budaya. Salah satu bentuk kearifan lokal itu tampak dalam budaya musyawarah, solidaritas, serta penghargaan terhadap perbedaan. (Nurdiansyah et al., 2024) menjelaskan bahwa tradisi "Tepung Tawar Perdamaian" di Sumatera Selatan, termasuk Palembang, menjadi cara penting dalam menyelesaikan konflik dengan mengutamakan harmoni dan saling menghargai antar pihak yang berseteru. Selain itu, terdapat slogan "*Wong Kito Galo*" yang berarti "kita semua bersaudara" juga memiliki peran dalam mempererat hubungan antarumat beragama dan antar suku di Palembang dikarenakan slogan tersebut mencerminkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan tanpa memandang agama, suku, atau latar belakangnya.

Tradisi "Tepung Tawar" juga menjadi salah satu contoh kearifan lokal yang efektif dalam meredam konflik. Menurut (Junaidi, 2023), ritual ini bertujuan untuk membersihkan dan menenangkan hati kedua belah pihak, sekaligus mempererat kembali hubungan sosial di antara mereka. Dengan

melibatkan tokoh adat, tradisi ini membantu mempercepat tercapainya perdamaian tanpa harus membawa konflik ke jalur hukum formal yang bisa memperbesar masalah.

Kearifan lokal di Palembang terbukti berperan penting dalam menjaga harmoni antaragama melalui mekanisme seperti gotong royong, penghormatan kepada tokoh agama, serta forum musyawarah tradisional seperti *duduk berimbang*. Namun, efektivitas nilai-nilai tersebut menghadapi tantangan dari modernisasi dan perkembangan media sosial. Studi kuantitatif di Palembang menunjukkan bahwa intensitas eksposur media modern memengaruhi identitas budaya masyarakat muda, dan sebagian mulai meninggalkan nilai-nilai adat yang menekankan kolektivitas dan kohesi sosial (Andriani, 2017). Temuan serupa juga terlihat pada tradisi Malemang di Musi Banyuasin, di mana proses modernisasi mengubah pola praktik tradisional dan melemahkan peran ritual adat sebagai media pemersatu masyarakat (Sutarto, 2016). Selain itu, penelitian di Sumatera Selatan mencatat bahwa perubahan sosial dan penetrasi nilai global menyebabkan tradisi lokal seperti budaya tutur yang selama ini menjadi sarana resolusi ketegangan berkurang pengaruhnya dalam masyarakat, sehingga membutuhkan penguatan melalui pendidikan dan revitalisasi nilai adat (Isabella & Periansyah, 2021). Dengan demikian, benturan antara nilai modern dan tradisi bukan hanya menghasilkan pergeseran praktik budaya, tetapi juga mempengaruhi legitimasi mekanisme resolusi konflik berbasis kearifan lokal dalam konteks masyarakat urban kontemporer.

Bentuk-Bentuk Tradisi Resolusi Konflik Antaragama yang Hidup dalam Masyarakat Palembang

Masyarakat Palembang memiliki berbagai tradisi yang berfungsi sebagai mekanisme resolusi konflik antaragama, yang dijalankan secara turun-temurun untuk menjaga kerukunan dan perdamaian. Salah satu tradisi yang paling khas adalah tepung tawar perdamaian, yang sudah ada sejak abad ke-17 pada masa pemerintahan Pangeran Sido Ing Kenayan. Tradisi ini dilakukan dengan melibatkan mediasi tokoh masyarakat dan tetua adat, di mana kedua pihak yang berselisih membawa ketan kunyit dan ayam panggang sebagai simbol perdamaian. Acara diawali dengan pemberian nasihat dari tokoh adat atau agama, kemudian kedua belah pihak disuapi makanan tersebut dan saling berjabat tangan sebagai tanda berdamai. Tradisi ini menekankan nilai musyawarah mufakat dan persatuan, serta mencerminkan nilai-nilai Pancasila, sehingga telah diakui sebagai warisan budaya takbenda Indonesia.

Semboyan “Wong Kito Galo” yang bermakna “kita semua bersaudara” menjadi fondasi filosofis yang membentuk identitas kolektif masyarakat Palembang. Nilai ini memuat pesan inklusivitas dan persatuan sosial yang melampaui batas agama, suku, maupun status sosial, sehingga memberikan legitimasi moral bagi tokoh agama dan tokoh adat untuk melakukan dialog serta mediasi ketika terjadi perselisihan. Lebih dari sekadar slogan budaya, prinsip ini menjadi kerangka etika sosial yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga mampu menurunkan potensi gesekan antaragama.

Implementasi nilai tersebut tampak nyata dalam tradisi Ruwahan, sebuah kegiatan ziarah dan doa bersama yang melibatkan pembersihan makam leluhur, berbagi makanan, dan pertemuan sosial

yang diikuti oleh warga dengan latar agama yang beragam. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai ritual religius, tetapi menjadi medium sosial di mana nilai persaudaraan “Wong Kito Galo” diaktualisasikan melalui interaksi, kebersamaan, dan solidaritas antarwarga. Dengan demikian, tradisi Ruwahan memperlihatkan bentuk konkret bagaimana semboyan “Wong Kito Galo” diterjemahkan ke dalam praktik sosial yang memperkuat hubungan antarkelompok dan meminimalkan potensi konflik keagamaan di Palembang.

Secara keseluruhan, masyarakat Palembang mengandalkan tradisi tepung tawar perdamaian, semboyan “Wong Kito Galo”, dan tradisi Ruwahan sebagai mekanisme sosial untuk meredam potensi konflik antaragama. Namun, agar argumentasinya kuat secara akademik, diperlukan penjelasan analitis mengenai bagaimana tradisi tersebut bekerja sebagai instrumen resolusi konflik. Tepung tawar perdamaian, misalnya, berfungsi sebagai ritual simbolik yang mempertemukan pihak-pihak yang berselisih dalam satu ruang interaksi sosial, di mana tokoh adat atau agama menjadi mediator yang memberikan nasihat moral serta kesepakatan damai. Melalui proses ini, konflik tidak hanya diselesaikan secara personal, tetapi juga dipulihkan secara sosial karena masyarakat menyaksikan dan menerima keputusan bersama.

Semboyan “Wong Kito Galo” berperan sebagai landasan identitas kolektif yang menekankan persaudaraan lintas agama. Nilai ini menciptakan norma sosial yang mendorong masyarakat untuk menjaga harmoni dan menghindari tindakan antagonistik. Dalam konteks konflik, norma tersebut memberikan tekanan sosial bagi individu atau kelompok agar memilih jalur dialog, bukan konfrontasi. Sementara itu, tradisi Ruwahan memperkuat relasi antarwarga melalui kegiatan kebersamaan yang meningkatkan kedekatan sosial dan memperkuat jejaring antaragama. Kegiatan ini menjadi ruang reproduksi nilai toleransi yang terbukti dapat menurunkan kecurigaan, menciptakan rasa memiliki bersama, serta membangun kepercayaan antarkelompok. Dengan demikian, ketiga kearifan lokal tersebut bukan sekadar warisan budaya, tetapi juga sistem sosial yang efektif dalam menciptakan stabilitas dan mencegah eskalasi konflik di Palembang.

Peran Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Memediasi Potensi Konflik Antaragama di Palembang

Kearifan lokal bukan sekadar warisan tradisi kuno yang dianggap tidak relevan di era modern. Sebaliknya, kearifan lokal merupakan sistem pengetahuan yang bersifat dinamis, mampu beradaptasi, terus berkembang seiring waktu untuk menghadapi berbagai tantangan baru yang ada. Kearifan lokal muncul dari proses panjang berupa observasi, percobaan, dan pembelajaran bersama, sehingga menghasilkan solusi yang cerdas dan berkelanjutan bagi permasalahan lokal. Selain itu, kearifan lokal juga menjadi sumber inspirasi dan inovasi yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan teknologi serta praktik yang lebih ramah lingkungan dan adil secara sosial.

Kearifan lokal memberikan warna dalam kebersamaan sebuah komunitas dan berfungsi untuk mendorong terbentuknya ikatan solidaritas. Ia juga berperan sebagai mekanisme kolektif untuk

mengatasi berbagai potensi yang dapat mengancam atau merusak hubungan antar pihak yang tumbuh dari kesadaran bersama dalam komunitas yang terintegrasi.

Nilai-nilai kearifan lokal di Palembang memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan antarumat beragama dan mencegah terjadinya konflik. Konsep persaudaraan atau yang biasa dikenal dengan istilah “*sanak*” di Palembang mengajarkan masyarakat setempat untuk melihat perbedaan sebagai bagian dari kekayaan budaya yang bisa mempererat hubungan antar individu dan bukan sebagai pemicu perpecahan. Dengan adanya rasa solidaritas yang kuat, perbedaan agama dan kepercayaan di kota Palembang menjadi lebih mudah diterima dan dihargai.

Kearifan lokal di Palembang tidak hanya menjadi warisan simbolik, tetapi terbukti terus beroperasi sebagai mekanisme sosial-komunikatif yang efektif dalam menghadapi konflik pada era modern. Sebagai bukti empiris, laporan dari Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menyatakan bahwa masyarakat Sumsel (termasuk Palembang) masih sangat mengandalkan musyawarah mufakat sebagai cara utama menyelesaikan sengketa, bahkan dalam konteks konflik politik dan sosial: konflik lokal, seperti sengketa tanah, “umumnya tidak sampai berujung pada kekerasan maupun proses hukum yang panjang.” (DetikSumbagsel, 2025). Hal ini menegaskan bahwa nilai deliberatif dari musyawarah tetap hidup dan diinternalisasi dalam struktur sosial kontemporer.

Lebih jauh, studi kualitatif tentang tradisi *Sedekah Kampung* di Kampung Kapitan Palembang menunjukkan bahwa kegiatan bersama lintas agama (musik, sedekah makanan, gotong royong) masih berlangsung, di mana tokoh agama dan warga dari berbagai keyakinan aktif berinteraksi (Pahlevi, 2023). Penelitian ini menemukan bahwa tradisi ini terus menumbuhkan “sikap kebersamaan dan kekeluargaan” yang secara nyata memperkuat kerukunan antarumat beragama dan menyerap potensi konflik ke dalam praktek sosial yang damai. (Pahlevi, 2023)

Namun, ada juga tanda-tanda transformasi di tengah modernisasi: misalnya, analisis antropologis atas adat pernikahan Palembang (periode 1990–2010) mencatat adanya pergeseran tata cara adat tradisional disebabkan oleh kebutuhan “kepraktisan,” faktor ekonomi, dan perubahan sosial — yang menunjukkan bahwa beberapa aspek kearifan lokal menjadi lebih pragmatis agar relevan dalam kehidupan modern (Salim, 2019).

Selain itu, dalam kajian nilai musyawarah lokal (seperti pada tradisi tepung tawar perdamaian), peneliti menegaskan bahwa ritual ini menginternalisasi nilai-nilai Pancasila — seperti persatuan dan musyawarah — meskipun dilakukan di masyarakat lokal, sehingga kearifan lokal itu tidak hanya simbol adat tetapi juga mekanisme nilai-nilai nasional yang kontekstual (Grant et al., 2022).

Secara keseluruhan, data empiris ini memperkuat argumentasi bahwa kearifan lokal di Palembang (termasuk musyawarah) tetap eksis dan relevan sebagai instrumen mediasi sosial. Meski menghadapi modernisasi dan tekanan praktis, nilai deliberatif dan kolektif lokal terus diadaptasi dan dipertahankan sebagai fondasi untuk resolusi konflik antarwarga yang damai dan inklusif.

Adanya adat dan sopan santun yang mengajarkan untuk saling menghormati juga sangat penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kota Palembang. Hal ini menciptakan ruang yang aman

dan nyaman bagi individu dari berbagai latar belakang untuk hidup berdampingan dengan rasa hormat. Bahkan dalam perayaan keagamaan, masyarakat Palembang diajarkan untuk saling menghargai, dimana hal ini semakin mempererat kerukunan antarumat beragama di kota Palembang.

Secara keseluruhan, kearifan lokal Palembang berfungsi sebagai landasan untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan mengutamakan kedamaian dalam menjalani kehidupan bersama.

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal di Palembang

Implementasi resolusi konflik dengan memanfaatkan kearifan lokal di Palembang adalah sebuah pendekatan yang menjanjikan namun juga memiliki tantangan tersendiri. Kearifan lokal mencakup nilai-nilai tradisional, norma sosial, adat istiadat, serta peran tokoh-tokoh masyarakat dan agama, memiliki potensi besar untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan membangun kembali harmoni. Namun, efektifitasnya sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat mendukung atau menghambat prosesnya. Berikut ada beberapa faktor pendukung dalam implementasi resolusi berbasis kearifan lokal.

Tabel 1 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Resolusi Berbasis Kearifan Lokal

No	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1	Keberadaan Nilai dan Tradisi Lokal yang Mengakar Kuat	Erosi Nilai-Nilai Tradisional Akibat Modernisasi dan Urbanisasi
2	Adanya Tokoh Adat dan Agama yang Dihormati	Perbedaan Interpretasi dan Penerapan Kearifan Lokal
3	Solidaritas dan Kohesi Sosial yang Cukup Tinggi	Keterbatasan Pengetahuan dan Pemahaman tentang Kearifan Lokal
4	Pengalaman Historis dalam Mengelola Keberagaman	Ketidakpercayaan Terhadap Mekanisme Tradisional
5	Dukungan dari Pemerintah Daerah	Potensi Manipulasi Kearifan Lokal untuk Kepentingan Tertentu
6	Potensi Kearifan Lokal sebagai Perekat Sosial	Kompleksitas Konflik Modern

Berdasarkan table diatas, factor pendukung implementasi resolusi berbasis kearifan lokal dijelaskan sebagai berikut:

1. Keberadaan Nilai dan Tradisi Lokal yang Mengakar Kuat. Palembang memiliki beragam nilai dan tradisi luhur yang menjunjung tinggi harmoni, musyawarah, dan gotong royong. Tradisi seperti *tepung tawar* (seperti yang disebutkan dalam hasil pencarian terkait Sumatera Selatan) atau bentuk kearifan lokal lainnya dapat menjadi modal sosial yang kuat untuk mediasi dan penyelesaian sengketa secara damai.
2. Adanya Tokoh Adat dan Agama yang Dihormati. Keberadaan tokoh adat (pemuka masyarakat) dan tokoh agama yang memiliki pengaruh dan dihormati oleh masyarakat dapat menjadi mediator yang efektif dalam menyelesaikan konflik. Mereka memiliki legitimasi moral dan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai lokal.

3. Solidaritas dan Kohesi Sosial yang Cukup Tinggi. Meskipun urbanisasi dan modernisasi dapat mengikis ikatan sosial tradisional, di beberapa komunitas di Palembang, rasa kebersamaan dan solidaritas masih kuat. Hal ini dapat mempermudah proses resolusi konflik secara kekeluargaan.
4. Pengalaman Historis dalam Mengelola Keberagaman. Sebagai kota yang multikultural sejak lama, Palembang memiliki pengalaman historis dalam hidup berdampingan dengan berbagai kelompok etnis dan agama. Pengalaman ini dapat menjadi pelajaran berharga dalam menyelesaikan konflik kontemporer.
5. Dukungan dari Pemerintah Daerah. Jika pemerintah daerah memiliki komitmen yang kuat untuk melestarikan dan memberdayakan kearifan lokal sebagai mekanisme resolusi konflik, hal ini akan menjadi faktor pendukung yang signifikan melalui kebijakan dan program-program yang relevan.
6. Potensi Kearifan Lokal sebagai Perekat Sosial. Nilai-nilai kearifan lokal seringkali mengandung elemen-elemen perekat lintas kelompok, seperti nilai saling menghormati, toleransi, dan empati, yang dapat membantu membangun kembali hubungan yang retak akibat konflik.

Adapun factor-faktor penghambat dijelaskan sebagai berikut:

1. Erosi Nilai-Nilai Tradisional Akibat Modernisasi dan Urbanisasi. Arus modernisasi dan urbanisasi dapat menggerus pemahaman dan praktik nilai-nilai kearifan lokal di kalangan generasi muda dan masyarakat secara umum. Hal ini dapat mengurangi efektivitasnya sebagai mekanisme resolusi konflik.
2. Perbedaan Interpretasi dan Penerapan Kearifan Lokal Makna dan cara penerapan kearifan lokal dapat bervariasi antar komunitas atau kelompok masyarakat di Palembang. Perbedaan interpretasi ini dapat menyulitkan proses mediasi jika tidak ada pemahaman yang sama.
3. Keterbatasan Pengetahuan dan Pemahaman tentang Kearifan Lokal Tidak semua anggota masyarakat, terutama generasi muda, memiliki pengetahuan yang mendalam tentang nilai-nilai dan mekanisme resolusi konflik berbasis kearifan lokal yang ada.
4. Ketidakpercayaan Terhadap Mekanisme Tradisional Sebagian masyarakat mungkin lebih memilih jalur hukum formal atau mekanisme resolusi konflik modern lainnya karena dianggap lebih cepat, efektif, atau memiliki kekuatan mengikat yang lebih jelas.
5. Potensi Manipulasi Kearifan Lokal untuk Kepentingan Tertentu. Ada risiko bahwa nilai-nilai kearifan lokal dapat disalahgunakan atau dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu

untuk mencapai kepentingan pribadi atau kelompok, yang justru dapat memperkeruh suasana konflik.

6. Kompleksitas Konflik Modern. Beberapa konflik modern mungkin memiliki akar penyebab yang kompleks dan melibatkan isu-isu di luar ranah nilai-nilai tradisional, seperti masalah ekonomi, politik, atau hukum yang rumit, sehingga penyelesaian berbasis kearifan lokal saja mungkin tidak mencukupi.

Strategi Pemerintah Palembang dalam Pencegahan Konflik Bernuansa Agama

Pemerintah Kota Palembang berhasil mempertahankan kondisi “zero konflik” melalui penguatan mekanisme pencegahan konflik berbasis kolaborasi lintas aktor. Pemerintah daerah dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) secara rutin menyelenggarakan dialog dan komunikasi antarumat beragama sebagai upaya deteksi dini terhadap potensi ketegangan sosial. Program ini terbukti efektif, dibuktikan dengan laporan resmi Pemkot Palembang yang menegaskan bahwa berbagai potensi gesekan, seperti sengketa rumah ibadah, dapat diselesaikan melalui mediasi dan komunikasi terbuka (Fatah, 2021). Komitmen ini juga diperkuat oleh pernyataan Wali Kota Palembang yang menegaskan bahwa kerukunan menjadi prasyarat utama keberlanjutan pembangunan wilayah (Sumeksco, 2025).

Upaya pencegahan konflik tidak hanya berlangsung pada tingkat pemerintah, tetapi juga diperluas hingga pendidikan dan lingkungan sosial. Nilai toleransi dan kebhinekaan disisipkan dalam pembinaan pemuda dan program kemasyarakatan yang melibatkan tokoh agama, akademisi, dan lembaga sosial. Saat kasus penolakan pendirian gereja HKBP mencuat, misalnya, FKUB menggunakan pendekatan dialog persuasif yang menekankan nilai hubungan antar-manusia dan penghormatan antaragama sehingga konflik dapat diredam tanpa eskalasi kekerasan (Fatah, 2021). Sejalan dengan itu, Kementerian Agama mencatat bahwa Sumatera Selatan, termasuk Palembang, berada dalam kondisi kerukunan yang kondusif dan stabil secara sosial. Bukti-bukti ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi dialogis, kemitraan multipihak, serta penegakan hukum yang adil telah membangun ekosistem resolusi konflik yang dapat bekerja secara efektif di tengah perubahan sosial modern.

Di sisi lain, program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan Pemerintah Palembang juga bertujuan menekan kesenjangan sosial sebagai salah satu faktor pemicu konflik. Pemerintah bersama FKUB dan organisasi masyarakat berupaya menguatkan kemandirian ekonomi warga melalui pelatihan UMKM dan peningkatan keterampilan kerja. Namun, sejumlah laporan menunjukkan bahwa tidak semua program berjalan mulus. Hambatan seperti keterbatasan partisipasi masyarakat, ketimpangan akses, dan kurangnya kemampuan adaptasi terhadap ekonomi digital menjadi tantangan nyata dalam implementasi di lapangan (Selatan, 2023)

Selain itu, mekanisme deteksi dini dan respons cepat juga dibangun untuk menangani isu sensitif sebelum berkembang menjadi konflik terbuka. Meski demikian, efektivitas sistem ini tetap sangat bergantung pada kualitas koordinasi dan keberanian para mediator lokal dalam menyampaikan situasi sebenarnya kepada pemerintah daerah. Dalam kasus sengketa rumah ibadah, misalnya, ditemukan

adanya resistensi warga sebagai respons terhadap persepsi ketidakadilan dalam perizinan, sehingga penyelesaian membutuhkan proses dialog panjang dan keterlibatan tokoh agama yang dihormati (Fatah, 2021).

Peran tokoh agama dan masyarakat masih menjadi pilar utama dalam meredakan ketegangan dan menciptakan ruang mediasi. Namun, menurut Kemenag RI, tantangan ke depan muncul dari perubahan pola komunikasi masyarakat yang kini banyak dipengaruhi media sosial, yang dapat mempercepat penyebaran informasi provokatif dan memperlemah mekanisme mediasi tradisional (Indonesia, 2023). Dengan demikian, upaya pemerintah Palembang bersifat multidimensi dan dinamis, di mana keberhasilan menjaga harmoni sosial tidak hanya ditentukan oleh program formal pemerintah, tetapi juga kemampuan menyesuaikan diri dengan dinamika sosial-keagamaan yang berubah.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Kota Palembang, sebagai daerah multikultural dengan keberagaman suku, agama, dan budaya, telah mengembangkan mekanisme resolusi konflik berbasis kearifan lokal yang efektif untuk menjaga stabilitas sosial dan meminimalisir potensi konflik antaragama. Konsep "Palembang Zero Konflik" bukanlah suatu konsep tanpa konflik, tetapi lebih kepada kemampuan masyarakat untuk mencegah eskalasi konflik menjadi kekerasan dan mencari penyelesaian secara damai melalui nilai-nilai tradisional.

Keberhasilan resolusi konflik di Palembang sangat dipengaruhi oleh kearifan lokal yang telah terintegrasi dalam kehidupan masyarakat, seperti tradisi "Tepung Tawar Perdamaian", semboyan "*Wong Kito Galo*", serta tradisi "*Ruwahan*". Nilai-nilai ini mengedepankan musyawarah mufakat, penghormatan terhadap perbedaan, dan solidaritas antarwarga di Kota Palembang. Selain itu, peran tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat menjadi kunci penting dalam proses mediasi dan penyelesaian sengketa yang ada.

Namun, meskipun mekanisme berbasis kearifan lokal ini telah terbukti efektif dalam menjaga keharmonisan sosial pada tingkat konflik kecil hingga menengah, tantangan besar dalam konsep "Palembang Zero Konflik" tetap ada. Modernisasi, urbanisasi, dan pengaruh media sosial mulai menggeser nilai-nilai tradisional yang sudah lama membentuk karakter masyarakat Palembang. Oleh karena itu, untuk mewujudkan "Palembang Zero Konflik" dalam masyarakat yang semakin dinamis, penting untuk mengintegrasikan mekanisme penyelesaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, M. (2017). Pengaruh media terhadap identitas budaya lokal Palembang. *Jurnal Komunikasi dan Budaya*, 9(2), 115–128.
- Braithwaite, J., Braithwaite, V., Cookson, M., & Dunn, L. (2010). *Anomie and violence: Non-truth and reconciliation in Indonesian peacebuilding*. ANU Press.
<https://doi.org/10.22459/AV.03.2010>

- DetikSumbagsel. (2025). Herman Deru Paparkan Kearifan Lokal, Pastikan Sumsel Zero Konflik. *Detik. detikcom*.
- Fatah, U. R. (2021). *Penanganan konflik rumah ibadah melalui dialog keagamaan di Kota Palembang*. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Foundation, W. (2021). *Laporan Survei Nasional Potensi Intoleransi, Ekstremisme, dan Kekerasan atas Nama Agama di Indonesia*. Wahid Foundation.
- Grant, A., Lintani, S., & dkk. (2022). Tepung Tawar Perdamaian: Resolusi Konflik Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila di Sumatera Selatan. *Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial*, 7(2).
- Indonesia, K. A. R. (2023). *Kerukunan umat beragama di Sumatera Selatan kondusif*. Kemenag RI.
- Isabella, I., & Periansyah, P. (2021). Upaya pencegahan paham radikalisme dan terorisme melalui kearifan lokal di Sumatera Selatan. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 6(1). <https://doi.org/10.36982/jpg.v6i1.1314>
- Izhatullaili, I., Mas' ud, F., & Jama, K. B. (2025). Konstruksi Keadilan di Era Media Sosial: No Viral No Justice dalam Kontroversi Bupati Pati. *Jurnal Civicatio*, 1(1), 1-9.
- Jaya, A. C. (2019). *Politik budaya Melayu: strategi kebudayaan masyarakat Melayu Palembang dalam menghadapi tantangan global* (pp. 68–84). *Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*.
- Junaidi. (2023). Model Tradisi Adat “ Tepung Tawar ” Dalam Penyelesaian Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam Keywords : Tepung Tawar. *Conflict Resolution ; Natural Resources*, 5, 265– 276. <https://doi.org/10.22437/zaake>
- Kale, D. Y. A., Mas' ud, F., & Nassa, D. Y. (2025). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk Karakter Bangsa yang Tangguh di Era Digital. *Media Sains*, 25(1), 9-14.
- Malleleang, A. M. A., KY, I. G. S., Santoso, P., & Saragih, H. J. R. (2022). Resolusi Konflik Kepercayaan Dalam Toleransi Beragama Pada Masyarakat Multikultural Di Indonesia. *Jurnal Education and Development*, 10(3), 183.
- Mas' ud, F., Izhatullaili, I., Doko, Y. D., & Jama, K. B. (2025). Pendidikan Bahasa Indonesia sebagai Sarana Penguatan Literasi Hukum di Era Digital. *Haumeni Journal of Education*, 5(2), 9-21.
- Mas'ud, F., Kale, D. Y. A., Gero, H. M. E., Kolianan, J. B., Sabariman, H., & Peranginangin, I. I. (2025). *Studi Masyarakat Indonesia. Tangguh Denara* Jaya Publisher.
- McRae, D. (2013). *A few poorly organized men: Interreligious violence in Poso, Indonesia*. Brill. <https://doi.org/10.1163/9789004253486>
- Nugraha, H. R., Alexandra, H. F. S., Adriyanto, A., & Risma, H. J. (2023a). Sinergi Pemerintah Kota Palembang dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam pencegahan konflik SARA guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat kota Palembang. *Cakrawala: Repositori IMWI*, 6(2).
- Nugraha, H. R., Alexandra, H. F. S., Adriyanto, A., & Risma, H. J. (2023b). *Sinergi Pemerintah Kota Palembang dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam pencegahan konflik SARA guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat kota Palembang*. Repositori IMWI.
- Nurdiansyah, E., Maftuh, B., & Malihah, E. (2024). *Tepung Tawar Perdamaian : Resolusi Konflik Berlandaskan Nilai- Nilai Pancasila di Sumatera Selatan: Vol. September* (pp. 285–294).
- Pahlevi, A. T. (2023). *Tradisi sedekah kampung dalam menjaga kerukunan umat beragama: Kajian kearifan lokal Kampung Kapitan Palembang (Tesis Magister, UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. UIN SGD Bandung. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

- Palembang, P. G. I. K. (2025). *PGI Sebut Kota Palembang Zero Konflik Antar Umat Beragama*.
- Putrihapsari, R., & Fauziah, P. Y. (2020). Manajemen pengasuhan anak usia dini pada ibu yang bekerja: sebuah studi literatur. *JIV-Jurnal Ilmiah Visi*, 15(2), 127–136. <https://doi.org/10.21009/jiv.1>
- Salim, H. (2019). Local wisdom and conflict resolution in adat-based communities in Indonesia. *Journal of Social and Political Sciences*, 2(1), 57–65. <https://doi.org/10.31014/aior.1991.02.01.54>
- Selatan, B. P. S. P. S. (2023). *Statistik kesejahteraan rakyat Provinsi Sumatera Selatan 2023*. BPS Sumsel.
- SuaraIndoid. (2024). *Setara Institute: Singkawang Paling Toleran, Sabang Paling Tidak Toleran*.
- Sumeksco. (2025). Ratu Dewa: FKUB jaga kerukunan demi menjaga tradisi Palembang zero konflik agama. *Sumeks*.
- Sutarto, D. (2016). Kearifan budaya lokal dalam penguatan tradisi Malemang di tengah masyarakat modernisasi di Sungai Keruh Musi Banyuasin Sumatera Selatan. *Jurnal Dimensi*, 5(3), 54. <https://doi.org/10.33373/dms.v5i3.54>
- Wibowo, I., Noe, W., Mas' ud, F., & Kale, D. Y. A. (2025). Pendidikan Moral Berbasis Pancasila Sebagai Antitesis Perilaku Echo Chamber di Kalangan Mahasiswa PPKn Universitas Khairun. *Haumeni Journal of Education*, 5(2), 78-86.